

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, H. Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum*, FH UMY, Yogyakarta.
- Djamali, Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid, A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2008, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1991, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Hiariej, Eddy O. S., 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P. A. F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Priyanto, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Soekamto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soesilo, R. 1996, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz. 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1981, *Bahan-bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832).

C. Karya Ilmiah dan Internet

Hanum, Arinal Nurrisyad, 2010, *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto*, Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Herlambang, Hero, 2012, *Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Pembimbingan Narapidana Pembebasan Bersyarat*, Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Panjaitan, Senator Boris, 2015, *Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melakukan Pembimbingan terhadap Anak yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat*, Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Balai Pemasyarakatan Klas IA Jakarta Pusat, "Sejarah Bapas Pusat", <http://bapaspusat.web.id/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 20.22 WIB.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalbar", <http://www.ditjenpas.go.id/category/berita-wilayah/page/75/>, diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 20.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.co.id/arti-kata/delik>, diakses pada 15 Maret 2016 pukul 23.12 WIB.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Lembaga Pemasyarakatan Salemba Klas IIA Jakarta", <http://www.kumham-jakarta.info/profil/upt/1046-lp-salemba>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 22.50 WIB.

Kompasiana, “Menkumham Membela Koruptor”,
http://www.kompasiana.com/hendra_budiman/menkumham-membela-koruptor, diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 20.10 WIB.

Kompasiana, “Saat Denny Indrayana Menjilat Ludah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012”,
http://www.kompasiana.com/pakde_kartono/saat-denny-indrayana-menjilat-ludah-tentang-pp-no-99-tahun-2012/, diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 20.06 WIB.

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Salemba, “Sejarah Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Salemba”,
<https://lapas2asalemba.wordpress.com/sejarah-lembaga-pemasarakatan-klas-ii-a-salemba/>, diakses pada tanggal 19 Februari 2016 pukul 22.42 WIB.

News Republika, “LAPAS Kelebihan Kapasitas karena Peraturan Pemerintah”,
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/19/o4a8bl384-lapas-kelebihan-kapasitas-karena-peraturan-pemerintah>, diakses pada tanggal 21 Maret 2016 pukul 00.54 WIB.

Tribun Nasional, “Presiden SBY Belum Baca Surat Priyo Soal Aduan Napi Korupsi”,
<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/15/presiden-sby-belum-baca-surat-priyo-soal-aduan-napi-korupsi>, diakses pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 20.09 WIB.